



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : A. INDRA JAYA ASAAD
- Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK : 137187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 918.680.000

- Tanah Seluas 39871 m2 di WAJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 202.355.000
- Tanah Seluas 39465 m2 di WAJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 201.325.000
- Tanah Seluas 105 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di MAROS, LAINNYA Rp. 160.000.000
- Tanah Seluas 100 m2 di MAROS, LAINNYA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.000.000

- MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.900.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.004.580.000

III. HUTANG Rp. 434.925.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 569.655.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.